

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



***Capacity Building* Organisasi Kemasyarakatan PWI-LS Kecamatan Cikedung,
Kabupaten Indramayu terhadap Krisis Ekosistem Pesisir Pantai**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

Anggota Mahasiswa:

Sherly (205250051)

Keysha Nafa Aulia S (205250216)

M.A. Jabbar Rivaldi (205250273)

Dion Raja Budiman (205250272)

Muhamad Feri Al'Buni (205240264)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JUNI 2026

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PKM

Periode 2026/2027

1. Judul PKM : *Capacity Buiding* Organisasi Kemasyarakatan PWI-LS Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu terhadap Krisis Ekonomi Pesisir Pantai
2. Nama Mitra PKM : PWI-LS Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
 - B. NIDN/NIK : 0409056702 / 3175080905670002
 - C. Jabatan/Gol : Dekan Fakultas Hukum
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum S1
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum Tata Negara
 - G. Nomor HP : 0877-7525-5683
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 5 (Lima) orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Sherly (205250051)
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Keysha Nafa Aulia S (205250216)
 - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : M.A Jabbar Rivaldi (205250273)
 - E. Nama & NIM Mahasiswa 4 : Dion Raja Budiman (205250272)
 - F. Nama & NIM Mahasiswa 5 : Muhamad Feri Al'Buni (205240264)
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - A. Wilayah Mitra : Jl. Ketimpal RT 02 RW 03 Desa Singaraja, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu
 - B. Kabupaten : Indramayu
 - C. Provinsi : Jawa Barat
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang Dihasilkan : Artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi SINTA
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) bulan
9. Biaya yang Diusulkan : Rp 9.000.000,00

Akhir Juni 2026

Menyetujui,
Ketua LPPM

Pelaksana



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
NIK: 1010303

Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.
NIK: 10291008

Capacity Building Organisasi Kemasyarakatan PWI - LS Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu Terhadap Krisis Ekosistem Pesisir Pantai

Abstrak

Kabupaten Indramayu sebagai wilayah pesisir utara Jawa menghadapi krisis ekosistem yang kompleks, meliputi degradasi mangrove, abrasi pantai yang meluas, pencemaran perairan, banjir rob, serta penurunan muka tanah. Fenomena ini diperparah oleh dampak perubahan iklim global serta keterbatasan kesadaran dan kapasitas kelembagaan masyarakat lokal dalam mitigasi bencana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi peran program penguatan kapasitas (capacity building) organisasi kemasyarakatan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, dalam menghadapi krisis ekosistem pesisir serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Metode: Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui metode pelaksanaan pengabdian yang komprehensif, meliputi sosialisasi dan edukasi geografis, simulasi penanganan bencana dengan pendekatan experiential learning, pembentukan jaringan informasi berbasis WhatsApp, serta program aksi penanaman vegetasi. Hasil: Kegiatan penguatan kapasitas ini terbukti signifikan dalam meningkatkan pemahaman ekologis masyarakat, membangun ketangguhan bencana bagi kader remaja, serta mendorong partisipasi aktif warga melalui penanaman pohon mangrove dan beringin sebagai pelindung alami pantai. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan pendanaan, fasilitas transportasi lapangan, dan belum optimalnya sinergi multi-stakeholder masih menjadi hambatan utama. Kesimpulan: Program capacity building berbasis organisasi keagamaan dan kultural memiliki potensi strategis sebagai mediator antara pemerintah dan akar rumput demi mewujudkan tata kelola pesisir yang partisipatif, legal, dan berkelanjutan

Kata Kunci: *Krisis Ekosistem Pesisir, Capacity Building, PWI-LS, Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas, Tata Kelola Pesisir Berkelanjutan*

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas daratan sekitar 1,9 juta km² dan garis pantai sepanjang ±99.000 km, Indonesia memiliki salah satu ekosistem pesisir terluas dan paling beragam secara hayati di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 287,6 juta jiwa pada tahun 2025 (BPS, 2025), tekanan terhadap sumber daya alam dan ekosistem pesisir terus meningkat. Wilayah pesisir menampung sekitar 60-70% populasi nasional dan menyumbang lebih dari 23% Produk Domestik Bruto (PDB) melalui sektor perikanan, pariwisata bahari, dan transportasi laut (Dahuri et al., 2001), sehingga kerusakan lingkungan pesisir bukan sekadar persoalan ekologis, melainkan ancaman nyata bagi penghidupan jutaan masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik menjadikan negara ini sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Berdasarkan data BNPB, bencana yang kerap terjadi meliputi banjir, banjir bandang, banjir rob, tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, kekeringan, gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Kerentanan berlapis ini menuntut kesiapsiagaan dan pengelolaan lingkungan yang komprehensif di setiap

tingkatan wilayah. Provinsi Jawa Barat, dengan luas sekitar 35.377 km² dan jumlah penduduk sekitar 50,7 juta jiwa pada tahun 2025 (BPS, 2025) sebagai provinsi terpadat di Indonesia, menghadapi tekanan lingkungan yang sangat besar. Kondisi geografisnya yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, sungai, dan wilayah pesisir membuat provinsi ini rentan terhadap banjir, tanah longsor, abrasi pantai, dan banjir rob.

Beberapa wilayah perkotaan seperti Bandung, Bekasi, dan Karawang sering tergenang banjir musiman, sementara kawasan perbukitan di Garut, Sumedang, dan Bandung Barat rawan longsor akibat curah hujan tinggi dan alih fungsi lahan. Di wilayah pesisir seperti Indramayu, Cirebon, dan Subang, abrasi dan banjir rob berdampak langsung pada aktivitas perikanan, pertanian, dan tambak masyarakat setempat. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Jawa Barat yang menghadapi krisis lingkungan paling kompleks. Dengan luas wilayah sekitar 2.099 km² dan jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa, kabupaten ini sekaligus merupakan sentra produksi padi terbesar di Jawa Barat dan penghasil ikan laut yang signifikan. Letak geografisnya di kawasan pantai utara Jawa menjadikannya sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Banjir musiman terjadi akibat luapan sungai, sistem drainase yang kurang optimal, serta pendangkalan sungai, menyebabkan pemukiman warga dan lahan pertanian sering tergenang.

Di wilayah pesisir seperti Kecamatan Cikedung dan Patrol, banjir rob diperparah oleh kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah, serta rusaknya vegetasi mangrove. Data menunjukkan laju abrasi di pesisir Indramayu mencapai 5-10 meter per tahun di beberapa wilayah, dan lebih dari 1.200 hektar tambak serta sawah pesisir telah tergenang akibat banjir rob yang semakin intensif. Penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah berlebihan mencapai 3-10 cm per tahun, jauh melampaui kenaikan muka air laut global yang rata-rata hanya 3,3 mm per tahun, sehingga wilayah pesisir Indramayu berisiko mengalami genangan permanen di masa depan. Kondisi ini diperburuk oleh degradasi hutan mangrove akibat abrasi, pencemaran, dan perubahan penggunaan lahan, yang menyebabkan hilangnya fungsi pelindung alami pantai sekaligus menurunnya kualitas ekosistem pesisir secara keseluruhan. Perubahan iklim turut memperburuk situasi. Kekeringan pada musim kemarau berdampak besar pada sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Indramayu. Selain itu, keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas lingkungan, baik dari sisi pencemaran udara maupun pencemaran perairan. Aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi tulang punggung kabupaten ini kini terancam secara serius oleh berbagai krisis ekosistem yang saling berkaitan.

Dalam konteks sosial keagamaan, Islam di Indonesia berkembang melalui pendekatan dakwah Walisongo yang santun dan akomodatif terhadap budaya lokal, menjadi fondasi penting bagi kerukunan dan keberagaman masyarakat. Namun belakangan muncul tantangan berupa upaya delegitimasi ulama Nusantara serta infiltrasi paham radikal yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ideologi negara. Merespons hal tersebut, pada tahun 2023 para tokoh Nahdliyin menginisiasi berdirinya Perjuangan Walisongo Indonesia - Laskar Sabilillah (PWI-LS), organisasi kemasyarakatan yang bertujuan menjaga marwah ulama Nusantara serta memperkuat ketahanan ideologi bangsa berdasarkan nilai Ahlussunnah wal Jama'ah.

PWI-LS hadir tidak hanya sebagai wadah sosial keagamaan, tetapi juga sebagai gerakan moral dalam menjaga stabilitas sosial dan kebangsaan. Kedekatan sosial dan kultural PWI-LS dengan masyarakat menjadikan organisasi ini memiliki potensi besar dalam mendorong partisipasi publik untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas (*Capacity Building*) bagi PWI-LS di Kabupaten Indramayu. *Capacity Building* merupakan proses peningkatan kemampuan individu maupun organisasi agar mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif dan berkelanjutan, mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur kelembagaan, serta peningkatan kemampuan dalam perencanaan, koordinasi, dan advokasi. Upaya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, khususnya tujuan terkait pengentasan kemiskinan, aksi perubahan iklim, perlindungan ekosistem laut, dan penguatan kemitraan pembangunan. Program ini mencakup empat dimensi utama.

Pertama, dimensi deskriptif-diagnostik, yaitu pemetaan kondisi aktual krisis ekosistem pesisir di Kecamatan Cikedung, meliputi abrasi pantai, banjir rob, degradasi mangrove, pencemaran udara, pencemaran perairan, kekeringan ekstim, serta pemetaan hubungan kausalitas antar-dimensi krisis sebagai prasyarat intervensi yang berbasis bukti (*evidence-based*).

Kedua, implementasi program *capacity building* bagi PWI-LS mencakup identifikasi program yang telah berjalan, analisis pendekatan metodologis, pemetaan aktor dan perannya, serta penguatan relasi organisasi dengan pemerintah daerah, lembaga akademis, LSM lingkungan, dan komunitas yang lebih luas.

Ketiga, evaluasi capaian konkret di lapangan, baik secara ekologis seperti pemulihan tutupan mangrove dan peningkatan kualitas air, maupun secara sosial seperti keterlibatan warga, peningkatan kesadaran lingkungan, dan kapasitas advokasi, sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural, kendala sumber daya, dan celah kebijakan yang membatasi efektivitas program.

Keempat, penguatan aparatur pemerintah desa melalui bimbingan teknis pembuatan surat keputusan dan penyusunan peraturan desa. Pelatihan dan penguatan aparatur pemerintah desa di Kabupaten Indramayu melalui bimbingan teknis pembuatan surat keputusan dan penyusunan peraturan desa, didukung implementasi hak tradisional masyarakat seperti upacara Ngarot dan Sedekah Bumi sesuai UU No. 6 Tahun 2014, serta penerapan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, telah mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, harmonis, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dimensi ini menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program lingkungan di tingkat desa dapat berjalan secara legal, partisipatif, dan berkelanjutan.

Melalui program *capacity building* yang terarah dan komprehensif, PWI-LS diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pengelolaan ekosistem pesisir yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu, khususnya di Kecamatan Cikedung, demi terwujudnya ketahanan masyarakat pesisir yang tangguh dalam menghadapi krisis lingkungan yang terus berkembang.

2. METODE PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan Program Abdimas yang ingin diterapkan adalah

1. Metode Sosialisasi dan Tanya Jawab

Identifikasi wilayah pesisir Indramayu. Dilanjutkan dengan edukasi kondisi geografis wilayah tersebut, potensi bencana dan karakteristiknya, serta peran penting kelompok keagamaan terhadap bencana ini dan pendalaman aturan penanggulangan bencana terhadap pemuka-pemuka agama. Materi juga akan mencakup analisis kejadian aktual Januari 2026 mengenai banjir yang melumpuhkan Indramayu dan sebanyak 2.724 orang warga terdampak (Antara, 2026) sebagai studi kasus nyata bagi peserta.

2. Simulasi / Permainan Penanganan Bencana

Penerapan program *outbound camp* lintas agama dengan konsep *experiential learning*.

Konsep *experiential learning* yang diterapkan terdiri dari tahapan berupa:

- a. *Concrete experience*, yaitu pemberian pengalaman nyata, bukan teori. Permainan *role-play* dokter-dokteran dengan menggunakan P3K, simulasi evakuasi, dan permainan antar pemuda agama lainnya. Diharapkan dengan diberlakukan kegiatan-kegiatan ini, dapat meningkatkan kesadaran pemuda agama mengenai besarnya dampak bencana, lelahnya evakuasi, dan pentingnya kerjasama.
- b. *Reflective observation*, yaitu pengamatan kembali atas kegiatan sebelumnya. Sesi *sharing* mengenai “simulasi” yang dilaksanakan tadi, pengalaman paling berkesan, perasaan saat menjadi penyelamat dan korban, ketakutan apabila tidak dapat terselamatkan, dll. Ditambah pelatihan *trauma healing*. Tahapan ini berguna untuk mengembangkan emosi dan pemikiran peserta.
- c. *Abstract conceptualization*, yaitu pembentukan pemahaman sendiri berkaitan dengan pengalaman dan evaluasi tadi. Membentuk kelompok kecil untuk saling mengeksplanasikan pemahaman mereka secara bergantian. Peserta tidak lagi hanya mengetahui, tetapi juga mengerti dan merasakan, sehingga mereka menjadi lebih kritis.
- d. *Active experimentation*, yaitu peserta mengimplementasikan pemahaman mereka. Setelah pulang dari *camp*, peserta mengedukasi warga mengenai panduan penggunaan P3K, “*do’s and dont’s*” pasca bencana, keperluan tas siaga bencana, serta membentuk tim relawan. Sehingga pemahaman mereka tidak berhenti hanya sampai *camp* selesai. Tetapi diimplementasikan ke dunia nyata.

3. Pembentukan Jaringan Informasi dan Konsultasi Online

Pembuatan *WhatsApp Group* sebagai upaya pembentukan jaringan informasi, media koordinasi, dan sarana konsultasi online. Sehingga siapapun bisa mengakses informasi cuaca, peringatan status bencana, dan berkonsultasi dengan tim ahli jika diperlukan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Tim pendamping akan memantau dan memaksimalkan peningkatan kesiapsiagaan bencana warga, serta tetap mengevaluasi dan merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Evaluasi program dilakukan dalam tiga tahap: evaluasi awal (*baseline*), evaluasi proses (*monitoring*), dan evaluasi akhir (*impact assessment*). Indikator keberhasilan mencakup tingkat kehadiran peserta, perubahan pengetahuan, dan kesiapsiagaan masyarakat, serta tingkat partisipasi dalam pemeliharaan sekitar. Instrumen evaluasi meliputi kuesioner, wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan observasi lapangan. Hasil evaluasi didiskusikan bersama masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan.

5. Bantuan Perlengkapan

Pada kesempatan ini, panitia upaya memberikan bantuan perlengkapan lapangan berupa peralatan keselamatan, tali tambang, P3K, senter, dll sebagai “modal” tim yang sudah dibentuk untuk siap siaga menghadapi berbagai macam kemungkinan.

3. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN KEGIATAN

Penelitian ini membahas pemberdayaan masyarakat Karangsong, Indramayu melalui sosialisasi dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama kelompok Pantai Lestari dan Dinas KKP untuk meningkatkan pengetahuan ekosistem mangrove serta tata kelola ekowisata berbasis lima prinsip pengembangan, dengan hasil masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga mangrove, munculnya atraksi baru berupa pengamatan burung menggunakan binocular, dan rekomendasi perbaikan fasilitas umum guna meningkatkan kunjungan wisatawan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Luaran		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terakreditasi SINTA	√
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	√
3	Produk/ <i>prototype</i>	√

4. KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Karangsong, Indramayu melalui sosialisasi dan FGD bersama kelompok Pantai Lestari serta Dinas KKP berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekosistem mangrove dan pengelolaan ekowisata secara berkelanjutan. Program ini menghasilkan inovasi atraksi wisata baru berupa pengamatan burung dengan binokuler, sekaligus menghasilkan rekomendasi perbaikan fasilitas umum. Secara keseluruhan, pendekatan berbasis lima prinsip pengembangan ekowisata ini terbukti efektif dalam mendorong kesadaran lingkungan sekaligus meningkatkan potensi wisata dan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkesinambungan.

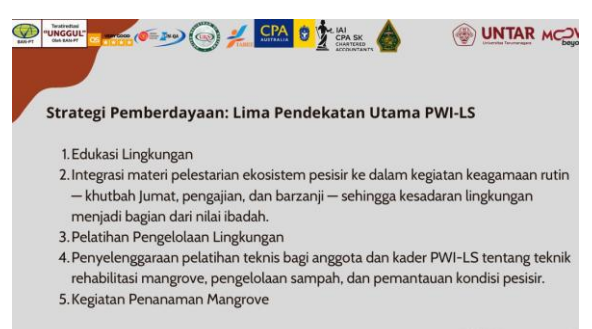
Warga Kecamatan Cikedung membutuhkan sekali kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana alam di sekitar wilayahnya, secara geografis kondisi alam di Kecamatan Cikedung termasuk ke dalam dataran rendah sehingga sangat berpotensi mengalami bencana alam seperti banjir. Penyebab terjadinya hal tersebut sangat kompleks, bisa saja diakibatkan curah hujan yang tinggi ditambah dengan angin barat laut yang membawa udara dingin, serta drainase yang sudah berkurang. Penyebab lainnya bisa terjadi karena luapan air sungai tetapi tanggul dan pintu air tidak optimal serta terjadinya kenaikan air laut melebihi batas normal.

Ancaman yang terus muncul mendesak warga mengambil posisi siaga. Mitigasi diperlukan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana alam sebagaimana yang diatur dalam pasal Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab pemerintah, kelembagaan (BNPB/BPBD), berdasarkan tahapan pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana serta hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana alam, non alam, dan sosial. Untuk itu program pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan kelompok organisasi remaja PWI-LS sebagai peranan penting di kalangan masyarakat daerah tersebut guna membentuk kepedulian lembaga terdekat kepada masyarakat sekitar sekaligus melatih para remaja untuk peduli terhadap lingkungan dan sekitar.

Pada saat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat akan mendapatkan sosialisasi informasi mengenai potensi bahaya geografis di wilayah tersebut, pelatihan mitigasi nyata seperti akan ada sesi simulasi, lalu, warga akan terlibat meminimalisir bencana dengan cara menanam pohon mangrove beserta pohon beringin yang memiliki fungsi penyerapan air agar lingkungan tetap terjaga, serta pembuatan saluran *WhatsApp* sebagai media informasi dan pengawasan selama 6 bulan yang akan dilakukan oleh tim pendamping. Program ini dirancang sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat dan melatih kepemimpinan lembaga masyarakat serta menambah informasi dan mempersiapkan masyarakat yang tangguh bencana.

5. LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan, dan Video (jika ada dan link videonya)
3. Draft Luaran Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya
4. Luaran berupa Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
5. Karya HKI
6. Laporan Produk/*prototype*
7. Surat persetujuan
8. Logbook





6. Program penanaman mangrove berbasis komunitas yang melibatkan jamaah, santri, dan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama, bukan sekadar peserta.
7. Penguatan Kerja Sama Masyarakat
8. Pembentukan forum musyawarah antar-desa sebagai wadah dialog antara masyarakat pesisir, nelayan, dan pemerintah desa yang difasilitasi PWI-LS.
9. Kampanye Peduli Pesisir
10. Gerakan sadar lingkungan melalui media sosial, spanduk, dan kegiatan aksi nyata yang menjangkau generasi muda dan memperluas dampak program.
-

- KONDISI EKOSISTEM PESISIR INDRAMAYU**
1. **Abrasi Pantai**
Gelombang laut yang terus-menerus mengikis garis pantai tanpa perlindungan vegetasi yang memadai
2. **Penebangan Hutan Mangrove**
Pengundulan mangrove secara ilegal menghilangkan fungsi pelindung alami pantai dan habitat biota laut.
3. **Sampah Plastik dan Limbah**
Pencemaran dari daratan mencemari perairan dan merusak ekosistem laut secara menyeluruh.
4. **Eksplotasi Sumber Daya Laut Berlebihan**
Penangkapan ikan melebihi kapasitas regenerasi menyebabkan penurunan populasi biota laut.
5. **Perubahan Iklim**
Kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem memperparah abrasi dan banjir rob di kawasan pesisir.
-

- Lima Program Aksi Terukur dan Berkelanjutan PWI-LS Kecamatan Cikedung**
1. Sosialisasi & Deklarasi Gerakan Pesisir PWI-LS
2. Formalisasi program peduli lingkungan pesisir ke dalam AD/ART dan program kerja organisasi. Sosialisasi masif kepada anggota, jamaah, dan masyarakat tentang ancaman krisis ekosistem pesisir Indramayu.
3. Penanaman Mangrove Berbasis Komunitas Pesantren
4. Target minimal 1.000 bibit/tahun dikelola bersama jamaah dan santri. Referensi: 200 anggota Pramuka SMKN 1 Losarang berhasil menanam 1.500+ bibit dalam setahun. Model Karangsong Indramayu terbukti berhasil dan kini menjadi destinasi wisata mangrove produktif.
5. Kegiatan Bersih Pantai dan Pengelolaan Sampah Masyarakat

- DAMPAK DARI KERUSAKAN ALAM KE PENDERITAAN MANUSIA**
- Dampak Lingkungan**
- Rusaknya Habitat Biota Laut — Hilangnya mangrove dan terumbu karang menyebabkan kepunahan lokal berbagai spesies ikan dan biota pesisir.
 - Banjir Rob dan Abrasi Meluas — Kawasan permukiman pesisir semakin sering terendam; infrastruktur vital rusak dan tidak tertangani.
- Pantai Eretan, Kec. Kandanghaur (Des. 2024)
Abrasi dan banjir rob memaksa banyak usaha warga tutup
- Pantai Eretan, Kec. Kandanghaur (Des. 2024)
Abrasi dan banjir rob memaksa banyak usaha warga tutup.
- Dampak Sosial Ekonomi**
- Menurunnya Hasil Tangkapan Nelayan
Produktivitas nelayan anjlok drastis akibat kerusakan ekosistem dan pencemaran perairan.
 - Menurunnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. Ribuan keluarga pesisir kehilangan sumber penghidupan dan terpaksa meninggalkan kampung halaman.
 - Kerusakan Lingkungan Jangka Panjang/Tanpa intervensi segera, kerusakan bersifat irreversible dan akan diwarisi generasi mendatang.

6. Aksi bersih pantai berkala yang melibatkan seluruh elemen komunitas, disertai program pengelolaan sampah berbasis desa sebagai solusi jangka panjang pencemaran pesisir.
7. Pengawasan Sosial Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal
8. Tim relawan patroli rutin di garis pantai — melaporkan penebangan ilegal, pembuangan limbah, dan pelanggaran zonasi (amanat Pasal 70, UU No. 32/2009).
9. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
10. Pelatihan keterampilan alternatif bagi nelayan dan warga pesisir: budidaya mangrove, ekowisata pesisir, dan pengolahan hasil laut — untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan.

- APA ITU CAPACITY BUILDING?**
- Capacity Building adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, maupun organisasi agar mampu menjalankan fungsi dan perannya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada
- Individu**
Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap setiap anggota organisasi dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan pesisir.
- kelompok/tim**
Penguatan koordinasi, komunikasi, dan solidaritas antaranggota agar mampu bekerja sama secara sinergis di lapangan.
- organisasi**
Pembinaan tata kelola, struktur program, dan sistem kerja PWI-LS agar mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat.

- TANTANGAN YANG DIHADAPI**
- KURANGNYA KESADARAN MASYARAKAT: SEBAGIAN WARGA PESISIR BELUM MEMAHAMI HUBUNGAN ANTARA KELESTARIAN EKOSISTEM DAN KEBERLANJUTAN HIDUP MEREKA
 - MINIMNYA DUKUNGAN DANA: PROGRAM LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS SERING TERHENTI KARENA KETERBATASAN ANGGARAN
 - KURANGNYA FASILITAS PENDUKUNG: SARANA TENNIS SEPAT BIKIT MANGROVE, ALAT, DAN TRANSPORTASI LAPANGAN MASIH TERBATAS
 - RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT: BELUM SEMUA ELEMEN MASYARAKAT MERASA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB TERHADAP EKOSISTEM PESISIR
 - KURANGNYA EDUKASI LINGKUNGAN: MINIMNYA AKSES INFORMASI ILMIAH YANG TERJANGKAU DI TINGKAT KOMUNITAS

Tujuan Kegiatan Capacity Building PWI-LS

- meningkatkan Pengetahuan Anggota
- Membekali anggota PWI-LS dengan pemahaman tentang ekosistem pesisir, abrasi, dan pelestarian lingkungan.
- Memperkuat Kapasitas Organisasi
- Meningkatkan kemampuan PWI-LS dalam mengelola program lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan.
- Menumbuhkan Kepedulian Lingkungan
- Membangun kesadaran ekologis berbasis nilai keagamaan dan budaya lokal.
- Mendorong Partisipasi Masyarakat
- Melibatkan masyarakat pesisir dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi lingkungan

Tantangan yang Dihadapi dan Solusi yang Ditawarkan

⚠️ Lima Tantangan Utama:

- Kurangnya kesadaran masyarakat — warga pesisir belum memahami hubungan ekosistem dan keberlangsungan hidup
- Minimnya dukungan dana — program lingkungan sering terhenti karena keterbatasan anggaran
- Kurangnya fasilitas pendukung — sarana teknis seperti bibit mangrove, alat, dan transportasi lapangan terbatas
- Rendahnya partisipasi masyarakat — belum semua elemen masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap pesisir
- Kurangnya edukasi lingkungan — minimnya akses informasi ilmiah di tingkat komunitas

Profil Organisasi: PWI-LS Kecamatan Cikeding Identitas Organisasi

- Nama Lengkap: Perjuangan Walisongo Indonesia – Laskar Sabillillah (PWI-LS)
- Jenis Organisasi: Ormas Keagamaan
- Tahun Berdiri: 2023, didirikan oleh sejumlah kiai pesantren di Indramayu
- Pengurus Kabupaten Dibentuk: 14 Desember 2024, di Aula Hotel Handayani, Indramayu
- Pimpinan: Ustadz Ade Zamroni

Visi dan Nilai

Fokus Utama:

- Pelestarian sejarah dan warisan budaya leluhur
- Penguatan tradisi keagamaan: tahlilan, barzanji, dan tradisi masyarakat
- Bidang sosial kemasyarakatan berbasis Pancasila dan UUD 1945
- Perlindungan keutuhan NKRI

Dukungan: Mendapat dukungan dari pengurus pusat, tokoh agama, unsur pemerintah, dan aparat keamanan daerah.

Lima Solusi Strategis:

- Meningkatkan kerja sama lintas sektor — sinergi antara ormas, pemerintah desa, dinas LH, dan dunia usaha
- Mengadakan pelatihan secara rutin — pembekalan kapasitas teknis dan manajerial anggota secara berkala
- Memperkuat organisasi masyarakat — konsolidasi internal dan penguatan tata kelola PWI-LS
- Mendorong partisipasi generasi muda — rekrutmen aktif pemuda pesisir sebagai kader lingkungan
- Menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan swasta — kemitraan untuk dukungan pendanaan, fasilitas, dan kebijakan

Peran Strategis Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelestarian Ekosistem

- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
- Ormas menjangkau lapisan masyarakat paling bawah melalui forum pengajian, barzanji, dan kegiatan keagamaan menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari nilai moral sehari-hari.
- Menggerakkan Partisipasi Sosial
- Dengan basis jamaah dan santri yang besar, ormas mampu memobilisasi relawan, peserta penanaman mangrove, dan tim patroli pantai secara organik dan cepat.
- Menjadi Penghubung Masyarakat dan Pemerintah
- Ormas berposisi sebagai mediator yang dipercaya antara komunitas nelayan di akar rumput dengan kebijakan pemerintah daerah.
- Mendukung Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan
- Ormas memiliki kepentingan jangka panjang dalam kelestarian lingkungan karena mewakili komunitas yang langsung bergantung pada ekosistem pesisir.

KESIMPULAN: MENJAGA PESISIR INDRAMAYU ADALAH KEWAJIBAN TIGA DIMENSI YANG TIDAK BISA DITUNDA

DIMENSI AGAMA

MENCINTAI TANAH BERTARTI MENCINTAI LAUT, PANTAI, DAN SETIAP EKOSISTEM YANG MEMBERI MAKAN RIBUAN KELUARGA NELAYAN. PELESTARIAN LINGKUNGAN ADALAH BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB MORAL DAN IBADAH KEPADA ALLAH ATAS AMANAH BUMI YANG DITITIPKAN. PWI-LS, SEBAGAI ORMAS BERBASIS PESANTREN, MEMILIKI OTORITAS MORAL UNTUK MEMIMPIN GERAKAN INI DARI DALAM KOMUNITAS.

DIMENSI HUKUM

NEGARA TELAH MEMBERIKAN MANDAT YANG JELAS MELALUI TIGA UNDANG-UNDANG: UU ORMAS, UU PPLH, DAN UU PWPJK. ORMAS MEMILIKI RUANG HUKUM YANG SAH DAN TERBUKA UNTUK BERPERAN — DARI AKSI LAPANGAN HINGGA ADVOKASI KEBIJAKAN PESISIR DI TINGKAT KABUPATEN.

DIMENSI ILMIAH

SAINS TELAH MENUNJUKKAN JALAN, REHABILITASI MANGROVE TERBUKTI EFEKTIF MENAHAN ABRASI, MODEL KARANGSONG INDRAMAYU TELAH BERHASIL, DAN REKOMENDASI AKADEMIS TELAH DIRUMUSKAN, YANG DIBUTUHKAN ADALAH KEHENDAK KOLEKTIF DAN KEBERANIAN UNTUK BERGERAK BERSAMA.

"MENJAGA PESISIR INDRAMAYU ADALAH KEWAJIBAN AGAMA, AMANAH LELUHUR, DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM YANG HARUS DITUNAIKAN BERSAMA."

Peran Strategis Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelestarian Ekosistem

Aspek	Ormas PWI-LS	Pemerintah
Jangkauan akar rumput	✔ Sangat luas	⚠ Terbatas birokrasi
Kepercayaan masyarakat	✔ Sangat tinggi	⚠ Bervariasi
Mobilisasi Komunitas	✔ Organik & cepat	✗ Tidak tersedia
Integrasi nilai moral	✔ Inheren	✗ Tidak relevan

SAATNYA BERGERAK: DARI KESADARAN MENUJU AKSI NYATA

PWI-LS LAHIR DARI PERJUANGAN ULAMA DAN KIAI PESANTREN YANG MENCINTAI INDRAMAYU. SAAT GARIS PANTAI MENYUSUT, MANGROVE HILANG, DAN ROB MAKIN SERING, DIAM BUKAN LAGI PILIHAN.

LANGKAH AWAL — SEGERA

TANAM MANGROVE, BERSIHKAN PANTAI, DAN AJAK JAMAAH PEDULI LAUT.

LANGKAH MENENGAH — 3-6 BULAN

RESMIKAN GERAKAN, BENTUK RELAWAN KECAMATAN, DAN MULAI PENANAMAN BERSAMA SANTRI.

LANGKAH STRATEGIS — JANGKA PANJANG

ADVOKASI KEBIJAKAN PESISIR, BANGUN SISTEM BERKELANJUTAN, DAN BERMITRA DENGAN PEMERINTAH. "CAPACITY BUILDING YANG BERMAKNA BUKAN SEKADAR PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI — MELAINKAN PENGUATAN TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF UNTUK ALAM DAN SESAMA MANUSIA."

TERIMA KASIH
DISKUSI & TANYA JAWAB



Lampiran 1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM dalam bentuk PPT



Lampiran 2. Dokumentasi foto-foto kegiatan

Capacity Building Organisasi Kemasyarakatan PWI - LS Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu Terhadap Krisis Ekosistem Pesisir Pantai

Rasji ¹, Sherly ², Keysha Nafa Aulia S ³, M.A. Jabbar Rivaldi ⁴, Dion Raja Budiman ⁵, Muhamad Feri Al'Buni ⁶

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: rasji@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: sherly.205250051@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: keysha.205250216@stu.untar.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ma.205250273@stu.untar.ac.id

⁵Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: dion.205250272@stu.untar.ac.id

⁶Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: muhamad.205240264@stu.untar.ac.id

Abstrak

Kabupaten Indramayu sebagai wilayah pesisir utara Jawa menghadapi krisis ekosistem yang kompleks, meliputi degradasi mangrove, abrasi pantai yang meluas, pencemaran perairan, banjir rob, serta penurunan muka tanah. Fenomena ini diperparah oleh dampak perubahan iklim global serta keterbatasan kesadaran dan kapasitas kelembagaan masyarakat lokal dalam mitigasi bencana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi peran program penguatan kapasitas (*capacity building*) organisasi kemasyarakatan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, dalam menghadapi krisis ekosistem pesisir serta meningkatkan kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Metode: Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui metode pelaksanaan pengabdian yang komprehensif, meliputi sosialisasi dan edukasi geografis, simulasi penanganan bencana dengan pendekatan *experiential learning*, pembentukan jaringan informasi berbasis WhatsApp, serta program aksi penanaman vegetasi. Hasil: Kegiatan penguatan kapasitas ini terbukti signifikan dalam meningkatkan pemahaman ekologis masyarakat, membangun ketangguhan bencana bagi kader remaja, serta mendorong partisipasi aktif warga melalui penanaman pohon mangrove dan beringin sebagai pelindung alami pantai. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan pendanaan, fasilitas transportasi lapangan, dan belum optimalnya sinergi multi-stakeholder masih menjadi hambatan utama. Kesimpulan: Program *capacity building* berbasis organisasi keagamaan dan kultural memiliki potensi strategis sebagai mediator antara pemerintah dan akar rumput demi mewujudkan tata kelola pesisir yang partisipatif, legal, dan berkelanjutan

Kata Kunci: Krisis Ekosistem Pesisir, Capacity Building, PWI-LS, Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas, Tata Kelola Pesisir Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas daratan sekitar 1,9 juta km² dan garis pantai sepanjang ±99.000 km, Indonesia memiliki salah satu ekosistem pesisir terluas dan paling beragam secara hayati di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 287,6 juta jiwa pada tahun 2025 (BPS, 2025), tekanan terhadap sumber daya alam dan ekosistem pesisir terus meningkat. Wilayah pesisir menampung sekitar 60-70% populasi nasional dan menyumbang lebih dari 23% Produk Domestik Bruto (PDB) melalui sektor perikanan, pariwisata bahari, dan transportasi laut (Dahuri et al., 2001), sehingga kerusakan lingkungan pesisir bukan sekadar persoalan ekologis, melainkan ancaman nyata bagi penghidupan jutaan masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik menjadikan negara ini sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Berdasarkan data BNPB, bencana yang kerap terjadi meliputi banjir, banjir bandang, banjir rob, tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, kekeringan, gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Kerentanan berlapis ini menuntut kesiapsiagaan dan pengelolaan lingkungan yang komprehensif di setiap tingkatan wilayah. Provinsi Jawa Barat, dengan luas sekitar 35.377 km² dan jumlah penduduk sekitar 50,7 juta jiwa pada tahun 2025 (BPS, 2025) sebagai provinsi terpadat di Indonesia, menghadapi tekanan lingkungan yang sangat besar. Kondisi geografisnya yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, sungai, dan wilayah pesisir membuat provinsi ini rentan terhadap banjir, tanah longsor, abrasi pantai, dan banjir rob.

Beberapa wilayah perkotaan seperti Bandung, Bekasi, dan Karawang sering tergenang banjir musiman, sementara kawasan perbukitan di Garut, Sumedang, dan Bandung Barat rawan longsor akibat curah hujan tinggi dan alih fungsi lahan. Di wilayah pesisir seperti Indramayu, Cirebon, dan Subang, abrasi dan banjir rob berdampak langsung pada aktivitas perikanan, pertanian, dan tambak masyarakat setempat. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Jawa Barat yang menghadapi krisis lingkungan paling kompleks. Dengan luas wilayah sekitar 2.099 km² dan jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa, kabupaten ini sekaligus merupakan sentra produksi padi terbesar di Jawa Barat dan penghasil ikan laut yang signifikan. Letak geografisnya di kawasan pantai utara Jawa menjadikannya sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Banjir musiman terjadi akibat luapan sungai, sistem drainase yang kurang optimal, serta pendangkalan sungai, menyebabkan pemukiman warga dan lahan pertanian sering tergenang.

Di wilayah pesisir seperti Kecamatan Cikedung dan Patrol, banjir rob diperparah oleh kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah, serta rusaknya vegetasi mangrove. Data menunjukkan laju abrasi di pesisir Indramayu mencapai 5-10 meter per tahun di beberapa wilayah, dan lebih dari 1.200 hektar tambak serta sawah pesisir telah tergenang akibat banjir rob yang semakin intensif. Penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah berlebihan mencapai 3-10 cm per tahun, jauh melampaui kenaikan muka air laut global yang rata-rata hanya 3,3 mm per tahun, sehingga wilayah pesisir Indramayu berisiko mengalami genangan permanen di masa depan. Kondisi ini diperburuk oleh degradasi hutan mangrove akibat abrasi, pencemaran, dan perubahan penggunaan lahan, yang menyebabkan hilangnya fungsi pelindung alami pantai sekaligus menurunnya kualitas ekosistem pesisir secara keseluruhan. Perubahan iklim turut memperburuk situasi. Kekeringan pada musim kemarau berdampak besar pada sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Indramayu. Selain itu, keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas lingkungan, baik dari sisi pencemaran udara maupun pencemaran perairan. Aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi tulang punggung kabupaten ini kini terancam secara serius oleh berbagai krisis ekosistem yang saling berkaitan.

Dalam konteks sosial keagamaan, Islam di Indonesia berkembang melalui pendekatan dakwah Walisongo yang santun dan akomodatif terhadap budaya lokal, menjadi fondasi penting bagi kerukunan dan keberagaman masyarakat. Namun belakangan muncul tantangan berupa upaya delegitimasi ulama Nusantara serta infiltrasi paham radikal yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ideologi negara. Merespons hal tersebut, pada tahun 2023 para tokoh Nahdliyin menginisiasi berdirinya Perjuangan Walisongo Indonesia - Laskar Sabilillah (PWI-LS), organisasi kemasyarakatan yang bertujuan menjaga marwah ulama Nusantara serta memperkuat ketahanan ideologi bangsa berdasarkan nilai Ahlussunnah wal Jama'ah.

PWI-LS hadir tidak hanya sebagai wadah sosial keagamaan, tetapi juga sebagai gerakan moral dalam menjaga stabilitas sosial dan kebangsaan. Kedekatan sosial dan kultural PWI-LS dengan masyarakat menjadikan organisasi ini memiliki potensi besar dalam mendorong partisipasi publik untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas (*capacity building*) bagi PWI-LS di Kabupaten Indramayu. *Capacity Building* merupakan proses peningkatan kemampuan individu maupun organisasi agar mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif dan berkelanjutan, mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur kelembagaan, serta peningkatan kemampuan dalam perencanaan, koordinasi, dan advokasi. Upaya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, khususnya tujuan terkait pengentasan kemiskinan, aksi perubahan iklim, perlindungan ekosistem laut, dan penguatan kemitraan pembangunan. Program ini mencakup empat dimensi utama.

Pertama, dimensi deskriptif-diagnostik, yaitu pemetaan kondisi aktual krisis ekosistem pesisir di Kecamatan Cikedung, meliputi abrasi pantai, banjir rob, degradasi mangrove, pencemaran udara, pencemaran perairan, kekeringan ekstrem, serta pemetaan hubungan kausalitas antar-dimensi krisis sebagai prasyarat intervensi yang berbasis bukti (*evidence-based*).

Kedua, implementasi program *capacity building* bagi PWI-LS mencakup identifikasi program yang telah berjalan, analisis pendekatan metodologis, pemetaan aktor dan perannya, serta penguatan relasi organisasi dengan pemerintah daerah, lembaga akademis, LSM lingkungan, dan komunitas yang lebih luas.

Ketiga, evaluasi capaian konkret di lapangan, baik secara ekologis seperti pemulihan tutupan mangrove dan peningkatan kualitas air, maupun secara sosial seperti keterlibatan warga, peningkatan kesadaran lingkungan, dan kapasitas advokasi, sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural, kendala sumber daya, dan celah kebijakan yang membatasi efektivitas program.

Keempat, penguatan aparat pemerintah desa melalui bimbingan teknis pembuatan surat keputusan dan penyusunan peraturan desa. Pelatihan dan penguatan aparat pemerintah desa di Kabupaten Indramayu melalui bimbingan teknis pembuatan surat keputusan dan penyusunan peraturan desa, didukung implementasi hak tradisional masyarakat seperti upacara Ngarot dan Sedekah Bumi sesuai UU No. 6 Tahun 2014, serta penerapan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, telah mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, harmonis, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dimensi ini menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan

program lingkungan di tingkat desa dapat berjalan secara legal, partisipatif, dan berkelanjutan.

Melalui program *capacity building* yang terarah dan komprehensif, PWI-LS diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pengelolaan ekosistem pesisir yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu, khususnya di Kecamatan Cikedung, demi terwujudnya ketahanan masyarakat pesisir yang tangguh dalam menghadapi krisis lingkungan yang terus berkembang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kondisi aktual krisis ekosistem pesisir di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana pelaksanaan program *Capacity Building* oleh PWI-LS Kecamatan Cikedung dalam menghadapi krisis ekosistem pesisir?
3. Bagaimana efektivitas program *Capacity Building* PWI-LS dalam meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir untuk pengelolaan dan pemulihan ekosistem pesisir yang berkelanjutan?

METODE PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan Program Abdimas yang tim terapkan adalah:

1. Metode Sosialisasi dan Tanya Jawab

Identifikasi wilayah pesisir Indramayu. Dilanjutkan dengan edukasi kondisi geografis wilayah tersebut, potensi bencana dan karakteristiknya, serta peran penting kelompok keagamaan terhadap bencana ini dan pendalaman aturan penanggulangan bencana terhadap pemuka-pemuka agama. Materi juga akan mencakup analisis kejadian aktual Januari 2026 mengenai banjir yang melumpuhkan Indramayu dan sebanyak 2.724 orang warga terdampak (Antara, 2026) sebagai studi kasus nyata bagi peserta.

2. Pembentukan Jaringan Informasi dan Konsultasi Online

Pembuatan *WhatsApp Group* sebagai upaya pembentukan jaringan informasi, media koordinasi, dan sarana konsultasi online. Sehingga siapapun bisa mengakses informasi cuaca, peringatan status bencana, dan berkonsultasi dengan tim ahli jika diperlukan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Tim pendamping akan memantau dan memaksimalkan peningkatan kesiapsiagaan bencana warga, serta tetap mengevaluasi dan merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Evaluasi program dilakukan dalam tiga tahap: evaluasi awal (*baseline*), evaluasi proses (*monitoring*), dan evaluasi akhir (*impact assessment*). Indikator keberhasilan mencakup tingkat kehadiran peserta, perubahan pengetahuan, dan kesiapsiagaan masyarakat, serta tingkat partisipasi dalam pemeliharaan sekitar. Instrumen evaluasi meliputi kuesioner, wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan observasi lapangan. Hasil evaluasi didiskusikan bersama masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan.

4. Bantuan Perlengkapan

Pada kesempatan ini, panitia upaya memberikan bantuan perlengkapan lapangan berupa peralatan keselamatan, tali tambang, P3K, senter, dll sebagai “modal” tim yang sudah dibentuk untuk siap siaga menghadapi berbagai macam kemungkinan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kondisi Krisis Ekosistem Pesisir

Temuan penelitian menunjukkan bahwa krisis ekosistem pesisir di Kabupaten Indramayu merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional. Kerusakan lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam seperti abrasi dan perubahan iklim, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka *Integrated Coastal Zone Management*, persoalan pesisir tidak dapat dipahami secara parsial karena setiap dimensi ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain.¹ Kondisi ini menegaskan bahwa pemulihan ekosistem pesisir Indramayu menuntut pendekatan terpadu yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar objek program.

Berkurangnya kawasan mangrove menyebabkan menurunnya kemampuan alami pesisir dalam menahan gelombang dan mencegah abrasi. Mangrove berfungsi sebagai sabuk hijau (*greenbelt*) yang meredam energi gelombang, menstabilkan garis pantai, serta menjadi habitat penting bagi biota perairan, hilangnya tutupan mangrove dengan demikian melemahkan ketahanan ekologis sekaligus ekonomi masyarakat pesisir.² Selain itu, pencemaran perairan akibat limbah domestik dan aktivitas ekonomi masyarakat, serta tekanan pencemaran udara dari aktivitas industri energi, turut memperburuk kualitas lingkungan pesisir secara keseluruhan.³ Faktor perubahan iklim memperberat seluruh tekanan tersebut: kenaikan muka air laut, peningkatan intensitas cuaca ekstrem, dan pergeseran pola musim memperbesar risiko banjir rob dan kekeringan yang dialami masyarakat.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kelembagaan, sehingga intervensi yang dirancang harus mampu menjangkau akar persoalan pada tataran kapasitas masyarakat dan tata kelola lokal.

Lebih jauh, krisis ekosistem pesisir di Kecamatan Cikedung tidak dapat dilepaskan dari tekanan perubahan iklim global yang berlangsung secara simultan dengan tekanan lokal. Kenaikan muka air laut, peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, serta pergeseran pola musim memperparah laju abrasi dan intensitas banjir rob yang dialami masyarakat pesisir⁵. Fenomena ini diperberat oleh penurunan muka tanah (*land subsidence*) akibat pengambilan air tanah berlebihan, sehingga sebagian wilayah pesisir Indramayu menghadapi risiko genangan permanen apabila tidak segera diatasi. Dalam konteks pengelolaan banjir pesisir, pengalaman kota-kota pesisir lain di Indonesia menunjukkan bahwa solusi struktural semata tidak memadai tanpa diimbangi penguatan tata kelola dan kesiapsiagaan masyarakat.⁶ Dengan demikian, akar persoalan krisis

¹Mongabay Indonesia, *Laporan Kondisi Lingkungan dan Ekosistem Pesisir Indramayu dan Jawa Barat (2024-2025)*, <https://www.mongabay.co.id>.

²Yus Rusila Noor, *et al.*, *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia* (Bogor: Wetlands International Indonesia Programme, 2012), hlm. 22-30.

³WALHI Jawa Barat, *Laporan Indeks Kualitas Udara dan Air Jawa Barat (2024-2025)*, <https://walhi.or.id/walhi-jawa-barat/>.

⁴IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability - Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), <https://doi.org/10.1017/9781009325844>.

⁵IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability - Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), <https://doi.org/10.1017/9781009325844>.

⁶Muh Aris Marfai dan Lorenz King, "Coastal Flood Management in Semarang, Indonesia", *Environmental Geology* (2008), hlm. 1507-1518, <https://doi.org/10.1007/s00254-007-1101-3>.

ekosistem pesisir bersifat berlapis dan saling memperkuat, menuntut respons yang terintegrasi antara aspek ekologis, teknis, sosial, dan kelembagaan.

Dimensi kelembagaan menjadi titik kritis yang kerap terabaikan dalam penanganan krisis ekosistem pesisir. Lemahnya kapasitas kelembagaan lokal, baik pada tingkat pemerintah desa maupun organisasi kemasyarakatan, menyebabkan upaya pelestarian lingkungan sering bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Padahal, dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir terpadu, keberhasilan rehabilitasi ekosistem sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan yang mampu mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan.⁷ Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai pilar penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁸ Oleh karena itu, penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan seperti PWI-LS menjadi kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan aksi nyata di tingkat akar rumput.

2. Analisis Implementasi Capacity Building oleh PWI-LS

Secara konseptual, capacity building dipahami sebagai proses peningkatan kemampuan individu, organisasi, dan sistem untuk menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Marilee S. Grindle merumuskan bahwa pengembangan kapasitas mencakup tiga dimensi yang saling terkait, yakni pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.⁹ Kerangka ini diperkuat oleh *United Nations Development Programme* yang menempatkan pengembangan kapasitas pada tiga tingkatan individu, organisasi, dan sistem yang harus dijalankan secara simultan agar perubahan bersifat melembaga dan tidak berhenti sebagai proyek sesaat.¹⁰ Dalam konteks entitas *non-profit* dan organisasi kemasyarakatan, pendekatan *capacity building* terbukti relevan untuk memperkuat tata kelola, kapasitas manajerial, dan keberlanjutan program¹¹.

Berdasarkan kerangka teoritis, program yang dijalankan PWI-LS telah mengarah pada ketiga dimensi pengembangan kapasitas. Pada tingkat individu, kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan mitigasi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga terhadap pelestarian lingkungan. Pada tingkat organisasi, pembentukan tim siaga, jaringan informasi berbasis *WhatsApp Group*, serta pendampingan selama enam bulan memperkuat struktur koordinasi dan mekanisme kerja organisasi. Pengalaman serupa pada penguatan kapasitas organisasi keagamaan menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif bila disertai pendampingan berkelanjutan dan kepemimpinan internal yang kuat.¹² Pada tingkat sistem, keterhubungan

⁷Mongabay Indonesia, *Laporan Kondisi Lingkungan dan Ekosistem Pesisir Indramayu dan Jawa Barat (2024-2025)*, <https://www.mongabay.co.id>.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 mengenai peran serta masyarakat.

⁹Marilee S. Grindle, *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries* (Boston: Harvard Institute for International Development, 1997), hlm. 6-22.

¹⁰United Nations Development Programme, *Capacity Development: A UNDP Primer* (New York: UNDP, 2009), hlm. 5-12, <https://www.undp.org>.

¹¹Anita Sulistyowati, *et al.*, "Kajian Literatur: Upaya Penerapan Capacity Building pada Entitas Non-Profit", *Prosiding SNAST* (2024), <https://ejournal.akprind.ac.id/index.php/snast/article/view/5048>.

¹²Bunjamin, *et al.*, "Capacity Building sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Pengurus Laziz Sabililah di Malang", *Jurnal Abdimas Berdaya* (2021), <https://journal.stie-mce.ac.id/index.php/jam/article/download/860/342>.

PWI-LS dengan pemerintah desa, akademisi, dan dinas terkait membuka peluang terbentuknya kerangka kebijakan lokal yang mendukung keberlanjutan program.

Keberhasilan program terlihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan pesisir. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi termasuk penanaman mangrove dan pohon penyerap air menunjukkan adanya perubahan perilaku yang positif. Pendekatan berbasis komunitas (*community-based natural resource management*) memang terbukti mampu menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap sumber daya pesisir, yang merupakan prasyarat keberlanjutan rehabilitasi mangrove.¹³ Penguatan modal sosial berupa norma komunitas, kepercayaan antarwarga, dan jaringan penghubung antara komunitas, pemerintah, dan LSM menjadi faktor kunci yang menentukan apakah partisipasi masyarakat dapat bertahan dalam jangka panjang.¹⁴ Dengan kedekatan sosial dan kultural yang dimilikinya, PWI-LS menempati posisi strategis sebagai jembatan modal sosial tersebut, sehingga pendekatan partisipatif yang digunakan cukup efektif dalam membangun kesadaran lingkungan masyarakat.

Apabila ditinjau lebih cermat, implementasi *capacity building* oleh PWI-LS memperlihatkan kekuatan utama pada dimensi individu dan organisasi. Pada dimensi individu, rangkaian edukasi mengenai kondisi geografis, potensi bencana, dan aturan penanggulangan bencana berhasil meningkatkan literasi ekologis warga, sementara pada dimensi organisasi, pembentukan tim siaga dan jaringan komunikasi memperkuat kapasitas koordinasi internal. Penguatan kapasitas yang menyentuh sumber daya manusia secara berjenjang ini merupakan inti dari konsep pengembangan kapasitas sebagaimana dirumuskan dalam literatur tata kelola pemerintahan dan pembangunan¹⁵. Hal ini juga menegaskan bahwa keberhasilan *capacity building* tidak diukur dari intensitas kegiatan semata, melainkan dari sejauh mana kemampuan baru tersebut terinternalisasi dan melembaga dalam praktik sehari-hari organisasi¹⁶.

Meskipun demikian, implementasi pada dimensi sistem masih menghadapi tantangan. Keterhubungan PWI-LS dengan struktur pemerintahan desa dan dinas terkait belum sepenuhnya terlembagakan dalam bentuk kebijakan atau perjanjian formal, sehingga keberlanjutan program masih bergantung pada inisiatif dan komitmen individual. Pengalaman penguatan kapasitas pada organisasi *non-profit* dan keagamaan lain menunjukkan bahwa pelembagaan pada tingkat sistem melalui regulasi, standar operasional, dan mekanisme pendanaan yang jelas merupakan prasyarat agar hasil program tidak surut setelah masa pendampingan berakhir.¹⁷ Oleh karena itu, *capacity building* PWI-LS perlu diarahkan agar tidak berhenti pada penguatan

¹³Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Komunitas, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Parikesit)*, Universitas Gadjah Mada (2025), <https://journal.ugm.ac.id/v3/parikesit/article/download/26316/6605>.

¹⁴"Menakar Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Mangrove", *Ulil Albab: Jurnal Hukum dan Teknologi*, Universitas Mulawarman (2024), <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/UJHT/article/download/23423/pdf>.

¹⁵Marilee S. Grindle, *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries* (Boston: Harvard Institute for International Development, 1997), hlm. 6-22.

¹⁶United Nations Development Programme, *Capacity Development: A UNDP Primer* (New York: UNDP, 2009), hlm. 5-12, <https://www.undp.org>.

¹⁷Anita Sulistyowati, *et al.*, "Kajian Literatur: Upaya Penerapan Capacity Building pada Entitas Non-Profit", *Prosiding SNAST* (2024), <https://ejournal.akprind.ac.id/index.php/snast/article/view/5048>.

individu dan organisasi, tetapi juga menembus dimensi sistem melalui integrasi ke dalam kerangka tata kelola desa.

3. Analisis Efektivitas Program

Efektivitas program dapat dinilai dari perubahan pengetahuan, sikap, dan partisipasi masyarakat setelah mengikuti kegiatan *capacity building*. Berdasarkan indikator keberhasilan tingkat kehadiran, perubahan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan tingkat partisipasi program menunjukkan dampak positif pada dimensi individu dan organisasi. Meskipun demikian, keberhasilannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, terutama pada dimensi sistem dan keberlanjutan kelembagaan.¹⁸

Keterbatasan sumber daya finansial menyebabkan ruang lingkup program menjadi terbatas, baik dari sisi cakupan wilayah maupun keberlanjutan kegiatan pasca pendampingan. Hambatan ini sejalan dengan temuan umum dalam literatur *capacity building* bahwa ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek kerap menghambat pelebagaan hasil program.¹⁹ Selain itu, belum optimalnya sinergi dengan pemerintah daerah dan kurangnya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak membuat beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Padahal, keberhasilan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi *multi-stakeholder* yang terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah, LSM, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat pesisir.²⁰ Pengarusutamaan agenda ini ke dalam kerangka pencapaian SDGs khususnya tujuan terkait aksi iklim, ekosistem laut dan darat, serta kemitraan dapat memperkuat legitimasi dan dukungan pembiayaan bagi program lanjutan.²¹

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif agar program dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup penguatan ketiga tingkatan kapasitas secara bersamaan: pelebagaan pengetahuan pada tingkat individu, penguatan tata kelola dan pendanaan mandiri pada tingkat organisasi, serta integrasi program ke dalam kebijakan dan peraturan desa pada tingkat sistem.²² Dengan demikian, *capacity building* PWI-LS tidak berhenti pada peningkatan kesadaran sesaat, melainkan berkembang menjadi mekanisme ketahanan masyarakat pesisir yang melembaga dan berkesinambungan.

Selain hambatan finansial dan kelembagaan, efektivitas program juga dipengaruhi oleh sejauh mana hasil kegiatan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Evaluasi terhadap dimensi keberlanjutan menunjukkan bahwa rasa kepemilikan kolektif yang tumbuh melalui pendekatan berbasis komunitas merupakan modal penting untuk menjaga keberlangsungan aksi pelestarian lingkungan setelah pendampingan

¹⁸Bikorin, *et al.*, “Kajian Literatur: Upaya Penerapan Capacity Building pada Entitas Non-Profit”, *Prosiding SNAST* (2024).

¹⁹Marilee S. Grindle, *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries* (Boston: Harvard Institute for International Development, 1997), hlm. 6-22.

²⁰“Menakar Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Mangrove”, *Ulil Albab: Jurnal Hukum dan Teknologi*, Universitas Mulawarman (2024), <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/UJHT/article/download/23423/pdf>.

²¹Bappenas, *Konsultasi Publik VNR Indonesia 2025: Kemajuan Implementasi SDGs 2021–2024* (Jakarta: Bappenas, 2025), <https://www.bappenas.go.id>.

²²United Nations Development Programme, *Capacity Development: A UNDP Primer* (New York: UNDP, 2009), hlm. 5-12, <https://www.undp.org>.

berakhir.²³ Keberlanjutan tersebut akan semakin kuat apabila ditopang oleh modal sosial yang melekat pada masyarakat, seperti norma gotong royong, kepercayaan antar warga, dan jaringan sosial yang menghubungkan komunitas dengan pemerintah serta lembaga pendukung.²⁴ Dalam konteks ini, peran PWI-LS sebagai organisasi yang berakar kuat secara sosial dan kultural menjadi faktor pembeda yang memperbesar peluang keberlanjutan program dibandingkan intervensi yang dijalankan oleh aktor luar.

Dengan mempertimbangkan capaian dan keterbatasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program capacity building PWI-LS telah efektif pada tataran peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat, namun masih memerlukan penguatan pada aspek keberlanjutan kelembagaan dan pendanaan. Penguatan aparatur pemerintah desa melalui bimbingan teknis penyusunan peraturan desa dan surat keputusan, sebagaimana telah diinisiasi pada program pengabdian sebelumnya, dapat menjadi pintu masuk untuk melembagakan hasil program ke dalam kebijakan lokal.²⁵ Dengan strategi yang lebih komprehensif dan dukungan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, capacity building PWI-LS berpotensi berkembang menjadi model ketahanan masyarakat pesisir yang dapat direplikasi di wilayah pesisir lain dengan karakteristik serupa.

SOLUSI

Krisis ekosistem pesisir di Kecamatan Cikedung membutuhkan penanganan yang menyeluruh melalui rehabilitasi lingkungan, pengurangan risiko bencana, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemulihan dan perlindungan mangrove menjadi prioritas utama karena ekosistem ini berperan sebagai pelindung alami dari abrasi dan gelombang laut sekaligus menjadi habitat penting bagi berbagai biota perairan yang menopang kehidupan masyarakat pesisir.²⁶ Selain itu, upaya mengurangi dampak abrasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dapat dilakukan dengan menggabungkan pendekatan fisik seperti pembangunan pemecah gelombang yang ramah lingkungan dan dipadukan dengan rehabilitasi mangrove, serta pendekatan non-fisik berupa penyusunan peta kerentanan, sistem peringatan dini, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana pesisir.²⁷ Langkah tersebut perlu diperkuat dengan pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan limbah yang lebih baik, penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), serta pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas ekonomi dan industri yang berpotensi merusak ekosistem pesisir.²⁸

Selain itu, ketahanan wilayah pesisir juga harus didukung oleh pengaturan pemanfaatan air tanah untuk

²³Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Komunitas, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Parikesit)*, Universitas Gadjah Mada (2025), <https://journal.ugm.ac.id/v3/parikesit/article/download/26316/6605>.

²⁴“Menakar Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Mangrove”, *Ulil Albab: Jurnal Hukum dan Teknologi*, Universitas Mulawarman (2024), <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/UJHT/article/download/23423/pdf>.

²⁵Rasji, “Penguatan Peran Aparatur Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Tugasnya di Kabupaten Indramayu Jawa Barat”, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* (2020).

²⁶ United Nations Environment Programme, *From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution*, Nairobi: UNEP, 2021.

²⁷ *Vulnerability*, Geneva: IPCC, 2022.

²⁸ United Nations Environment Programme, *From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution*, Nairobi: UNEP, 2021.

mengurangi risiko penurunan muka tanah, melalui pembatasan eksploitasi air tanah dan pengembangan sumber air alternatif yang lebih berkelanjutan.²⁹ Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekosistem juga menjadi aspek penting, misalnya melalui pengembangan ekowisata mangrove, budidaya perikanan yang ramah lingkungan, pengolahan hasil perikanan, serta usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal agar peningkatan kesejahteraan tidak merusak lingkungan.³⁰ Keberhasilan seluruh upaya tersebut sangat ditentukan oleh penguatan kelembagaan lokal, partisipasi masyarakat, serta penerapan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Zone Management/ICZM*) yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.³¹ Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan partisipatif, keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat dicapai secara lebih berkelanjutan.

Pelaksanaan program *capacity building* oleh PWI-LS Kecamatan Cikedung dalam menghadapi krisis ekosistem pesisir perlu difokuskan pada penguatan kapasitas individu sekaligus kelembagaan secara berkelanjutan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan sebaiknya dirancang lebih praktis, dengan menekankan peningkatan keterampilan masyarakat dalam rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah berbasis komunitas, konservasi sumber daya pesisir, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.³² Selain itu, pembentukan kader lingkungan di tingkat desa menjadi penting sebagai penggerak yang dapat mendorong keberlanjutan kegiatan konservasi di masyarakat. Dari sisi organisasi, PWI-LS juga perlu memperkuat tata kelola internal melalui kejelasan struktur kerja, peningkatan kapasitas kepemimpinan dan manajemen program, serta penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang konsisten agar organisasi dapat berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.³³ Tim siaga serta kelompok peduli lingkungan yang sudah terbentuk juga perlu memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah desa agar memiliki legitimasi serta akses terhadap dukungan program pembangunan.³⁴

Di sisi lain, efektivitas *capacity building* juga sangat bergantung pada penguatan jaringan kerja dan sistem pendukung yang berkelanjutan. PWI-LS perlu memperluas kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, LSM, sektor swasta, dan komunitas lingkungan untuk memperkuat pertukaran pengetahuan, dukungan teknis, serta akses pendanaan bagi program rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.³⁵ Program pelestarian lingkungan juga perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan peraturan desa agar menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.³⁶ Keberlanjutan program harus didukung oleh skema pendanaan yang memadai, baik melalui dana desa, CSR, hibah lingkungan, maupun pengembangan usaha ekonomi berbasis konservasi.³⁷ Terakhir, *capacity building* perlu diarahkan pada pembentukan sistem tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui forum komunikasi dan mekanisme koordinasi yang jelas, sehingga pengelolaan lingkungan pesisir dapat berjalan lebih teratur, partisipatif, dan berkesinambungan.³⁸

²⁹ Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, Geneva: IPCC, 2022.

³⁰ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Groundwater and Land Subsidence Studies*, Paris: UNESCO.

³¹ Food and Agriculture Organization, *The World's Mangroves 2000–2020*, Rome: FAO, 2023.

³² United Nations Development Programme, *Capacity Development: A UNDP Primer*, New York: UNDP, 2009.

³³ United Nations Development Programme, *Capacity Assessment Methodology User's Guide*, New York: UNDP, 2008.

³⁴ Food and Agriculture Organization, *Community-Based Natural Resource Management Guidelines*, Rome: FAO.

³⁵ World Bank, *Social Accountability and Community-Driven Development Toolkit*, Washington, D.C.: World Bank.

³⁶ Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, Pedoman Penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

³⁷ United Nations Environment Programme, *Financing Sustainable Development and Environmental Management*, Nairobi: UNEP.

³⁸ United Nations Development Programme, *Local Governance and Community Empowerment for*

Efektivitas program *capacity building* yang dijalankan PWI-LS dalam meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola serta memulihkan ekosistem secara berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh proses pelebagaan pengetahuan, penguatan partisipasi warga, dan kemandirian organisasi. Upaya pelebagaan pengetahuan dapat dilakukan melalui pendidikan yang berkelanjutan, seperti pembentukan kader lingkungan desa, sekolah pesisir, serta pelatihan rutin mengenai konservasi mangrove, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim, sehingga pengetahuan tersebut tidak berhenti sebagai informasi sesaat, melainkan menjadi bagian dari kebiasaan dan budaya masyarakat pesisir.³⁹ Di samping itu, partisipasi masyarakat yang berbasis modal sosial seperti gotong royong, rasa saling percaya, dan kepedulian terhadap lingkungan perlu terus diperkuat melalui kegiatan bersama seperti penanaman mangrove, kerja bakti, serta diskusi warga pesisir agar masyarakat benar-benar terlibat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan.⁴⁰ Dari sisi kelembagaan, PWI-LS juga perlu memperbaiki tata kelola organisasi melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang lebih sistematis, sekaligus meningkatkan kemandirian organisasi melalui penguatan jejaring kerja sama dan diversifikasi sumber pendanaan.⁴¹

Sementara itu, keberlanjutan program sangat ditentukan oleh penguatan sistem pembiayaan, integrasi dalam kebijakan, kolaborasi berbagai pihak, serta evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Sumber pendanaan dapat diperluas melalui dana desa, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah lingkungan, kerja sama dengan lembaga donor, hingga pengembangan usaha ekonomi yang berbasis konservasi.⁴² Agar memiliki landasan hukum yang kuat, kegiatan *capacity building* perlu dimasukkan ke dalam peraturan desa, keputusan kepala desa, serta dokumen perencanaan pembangunan desa, sehingga tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan.⁴³ Selain itu, kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lingkungan perlu diperkuat untuk memperluas akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan pendanaan.⁴⁴ Pada akhirnya, sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat secara langsung juga perlu dikembangkan, tidak hanya untuk menilai capaian kegiatan, tetapi juga perubahan perilaku, kondisi ekosistem, dan keberlanjutan kelembagaan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan program ke depan.⁴⁵

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa krisis ekosistem pesisir di Kecamatan

³⁹ Food and Agriculture Organization, *Community-Based Environmental Education Guidelines*, Rome: FAO.

⁴⁰ World Bank, *Social Capital and Community-Based Development*, Washington, D.C.: World Bank.

⁴¹ United Nations Development Programme, *Capacity Development: A UNDP Primer*, New York: UNDP, 2009.

⁴² United Nations Environment Programme, *Financing Sustainable Development and Environmental Management*, Nairobi: UNEP.

⁴³ Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan RPJM Desa

⁴⁴ United Nations Development Programme, *Local Governance and Multi-Stakeholder Partnerships*, New York: UNDP.

⁴⁵ United Nations Environment Programme, *Monitoring and Evaluation in Environmental Management Projects*, Nairobi: UNEP.

Cikedung merupakan masalah yang cukup serius dan terjadi akibat berbagai faktor yang saling berkaitan. Abrasi pantai, banjir rob, kerusakan hutan mangrove, pencemaran lingkungan, serta perubahan iklim telah memberikan dampak yang besar terhadap kondisi wilayah pesisir. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sumber daya pesisir. Oleh karena itu, penanganan masalah ini perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai aspek, baik lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekosistem pesisir tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik semata. Keberhasilan pengelolaan lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta adanya dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak lainnya menjadi kunci penting dalam menjaga dan memulihkan kondisi lingkungan pesisir secara berkelanjutan.

Pelaksanaan *capacity building* yang dilakukan oleh PWI-LS telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan pesisir. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pembentukan tim siaga lingkungan, serta penguatan komunikasi dan koordinasi antarwarga, masyarakat mulai menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan pendanaan, serta belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar hasil yang dicapai dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berjangka panjang.

Ke depan, upaya pengelolaan ekosistem pesisir di Kecamatan Cikedung perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, memperluas jaringan kerjasama, penguatan kelembagaan lokal, serta mengintegrasikan program-program lingkungan ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan desa. Dengan dukungan pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor lainnya, diharapkan upaya pemulihan dan perlindungan ekosistem pesisir dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Pada akhirnya, langkah-langkah tersebut tidak hanya akan mendukung kelestarian lingkungan pesisir, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan komitmen dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak, diharapkan kondisi ekosistem pesisir dapat terus membaik, sehingga mampu mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. (2026). *Perkembangan situasi dan penanganan bencana di Indonesia pada 31 Desember 2025 s.d. 1 Januari 2026*. <https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di->
- Bappenas. (2021). *Voluntary National Review 2021: Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic for the achievement of the 2030 Agenda*. <https://sdgs.bappenas.go.id>
- Bappenas. (2025). *Konsultasi Publik VNR Indonesia 2025: Kemajuan Implementasi SDGs 2021-2024*. <https://www.bappenas.go.id>
- Bikorin, Sulistyowati, A., Khoirunisa, N., & Febriani, N. (2024). Kajian literatur: Upaya penerapan capacity building pada entitas non-profit. *Prosiding SNAST*.

<https://ejournal.akprind.ac.id/index.php/snast/article/view/5048>

- BNPB. (2026). *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://dibi.bnpb.go.id/>
- BPS – Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024–2025). *Estimasi jumlah penduduk Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Indramayu*. <https://www.bps.go.id>
- Budhiman, I. (2021). *5 contoh surat keputusan yang baik dan benar dilengkapi cara membuatnya*. <https://www.99.co/blog/indonesia/contoh-surat-keputusan/>
- Bunyamin, Munfaqiroh, S., Liana, Y., Salim, A., Irawati, R., Prasetyo, I. B., & Sudiarto, E. (2021). Capacity building sebagai upaya peningkatan kemampuan pengurus Laziz Sabililah di Malang. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat*. <https://journal.stie-mce.ac.id/index.php/jam/article/download/860/342>
- Capacity Building & Human Resource Development Journal. (2024). *PPSDM UII Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://journal.uinjkt.ac.id/capacity>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2001). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. PT Pradnya Paramita.
- Databoks/Katadata. (2025). *Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Provinsi di Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/>
- Databoks/Katadata. (2025). *West Java most polluted in Indonesia*. Indonesia Center for Economic and Business Data.
- Fatah, R. A. (2024). Peningkatan kapasitas (capacity building) Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Sofifi Maluku Utara. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/24995>
- IPCC. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
- IQAir. (2025). *Kualitas udara Indramayu, Jawa Barat, Indonesia*. <https://www.iqair.com/id/indonesia/west-java/indramayu>
- Kompas.com. (2022). *Bencana ekologis di Jawa Barat*. <https://www.kompas.com>
- Kompas.com. (2022). *Berapa luas negara Indonesia?*. <https://www.kompas.com/global/read/2022/11/01/170000370/berapa-luas-negara-indonesia>
- Localize SDGs Indonesia. (2025). *17 tujuan pembangunan berkelanjutan: Target dan indikator*. <https://localisesdgs-indonesia.org/17-sdgs>
- Marfai, M. A., & King, L. (2008). Coastal flood management in Semarang, Indonesia. *Environmental Geology*, 1507–1518. <https://doi.org/10.1007/s00254-007-1101-3>
- Marilee S. Grindle, *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries* (Boston: Harvard Institute for International Development, 1997)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Mongabay Indonesia. (2024–2025). *Laporan kondisi lingkungan dan ekosistem pesisir Indramayu dan Jawa Barat*. <https://www.mongabay.co.id>
- Noor, Y. R., Khazali, M., & Suryadiputra, I. N. N. (2012). *Panduan pengenalan mangrove di Indonesia*. Wetlands International Indonesia Programme.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa. <https://jdih.indramayukab.go.id/>

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- Rasji. (2020). Penguatan peran aparat pemerintah desa untuk pelaksanaan tugasnya di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*.
https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10291008_4A100921084959.pdf
- Rasji, et al. (2023). Sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi. *Jurnal Serina Abdimas*.
<https://doi.org/10.24912/jsa.v1i1.22678>
- Saugi, A. (2009). *Masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan*.
<https://achmadsaugi.wordpress.com/2009/12/11/masyarakat-perkotaan-dan-pedesaan/>
- SDGs Center Universitas Brawijaya. (2025). *Tujuan 15: Ekosistem darat – Target dan indikator nasional*.
<https://sdgscenter.ub.ac.id/tujuan-15>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 mengenai peran serta masyarakat.
- UNDP. (2009). *Capacity development: A UNDP primer*. United Nations Development Programme.
<https://www.undp.org>
- UNDRR. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
<https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>
- UNEP. (2024). *Goal 14: Life below water – Why it matters*.
<https://www.unep.org/exploretopics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-14>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2023). *The sustainable development goals report 2023: Goal 14*. <https://sdgs.un.org/goals/goal14>
- WALHI Jawa Barat. (2024–2025). *Laporan indeks kualitas udara dan air Jawa Barat*.
<https://walhi.or.id/walhi-jawa-barat/>
- World Health Organization. (2021). *WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- Yogatama, G. A., Ghifary, M. T., Wicaksana, A., Subagio, D. P. W., Soeprawiro, P. A., & Putra, A. P. (2025). Pendekatan capacity building dalam peningkatan kapasitas manajerial pengelola klub sepak bola amatir di Surabaya. *Pelayanan Unggulan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*.
<https://pkm.lpkd.or.id/index.php/Unggulan/article/download/2400/2348/13193>
- Yus Rusila Noor, et al., Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia (Bogor: Wetlands International Indonesia Programme, 2012)

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026098794, 26 Juni 2026

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. Dion Raja Budiman dkk**
Alamat : Perumahan Merpati Blok O No 18 RT 006/010, Kalideres, Kota Adm.
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. Dion Raja Budiman dkk**
Alamat : Perumahan Merpati Blok O No 18 RT 006/010, Kalideres, Kota Adm.
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Program Capacity Organisasi Kemasyarakatan PWI-LS
Kecamatan Cikidang, Kabupaten Indramayu Terhadap Krisis
Ekosistem Pesisir Pantai.**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 22 Juni 2026, di Kota Adm. Jakarta Barat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001305589

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H	Perumahan Merpati Blok O No 18 RT 006/010 Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat
2	Dion Raja Budiman	Jl. Sebengkong Waru, Kec Tarakan Tengah, Kelurahan Sebengkong, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tarakan Tengah, Kota Tarakan
3	Keysha Nafa Aulia S	Jl. Ahmad Yani Babussalam, Kab. Aceh Tenggara
4	Sherly	Jl. Merdeka Baruno.02 Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang
5	M.A. Jabbar Rivaldi	JLN ST MOH MANSYUR NO.546 Ilir Barat II, Kota Palembang
6	Muhamad Feri Al'Buni	Jalan Cendrawasih II No 100 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H	Perumahan Merpati Blok O No 18 RT 006/010 Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat
2	Dion Raja Budiman	Jl. Sebengkong Waru, Kecamatan Tarakan Tengah, Kelurahan Sebengkong, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Tarakan Tengah, Kota Tarakan
3	Keysha Nafa Aulia S	Jl. Ahmad Yani Babussalam, Kab. Aceh Tenggara
4	Sherly	Jl. Merdeka Baruno.02 Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang
5	M.A. Jabbar Rivaldi	JLN ST MOH MANSYUR NO. 546 Ilir Barat II, Kota Palembang
6	Muhamad Feri Al'Buni	Jalan Cendrawasih II No 100 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat





Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Lampiran 4. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual

CAPACITY BUILDING

ORGANISASI KEMASYARAKATAN PWI-LS

Latar Belakang

Pesisir Indramayu rentan abrasi, banjir rob, dan pencemaran. Penguatan kapasitas masyarakat diperlukan untuk mitigasi bencana.

Peran PWI-LS

Edukator, fasilitator, penghubung, dan penggerak relawan bencana.



Dasar Ancaman Hukum

UU NO. 24 THN 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
UU NO. 32 THN 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan.
PP NO. 21 THN 2008 Tentang Penanggulangan Bencana.
Peraturan Terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengembangan Kemampuan PWI-LS

- Edukasi Masyarakat
- Manajemen Organisasi
- Komunikasi Bencana
- Kepemimpinan Relawan
- Pemetaan Risiko
- Kerja Sama Mitra

Dibuat oleh:

- Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H
- Sherly
- Keysha Nafa Aulia S
- M.A. Jabbar Rivaldi
- Dion Raja Budiman
- Muhamad Feri Al'Buni

Tujuan Capacity Building PWI-LS

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Memperkuat kapasitas organisasi.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
4. Menciptakan anggota yang kompeten, profesional, dan berdaya saing.

Goals

- Meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan PWI-LS
- Agar mampu menjalankan fungsi sosial,
- Sebagai sarana pemberdayaan masyarakat ,
- Bentuk kepedulian lingkungan secara lebih profesional, efektif, dan berkelanjutan

PETA CIKEDUNG



Langkah Mitigasi

1. Identifikasi Risiko
2. Pencegahan
3. Kesiapsiagaan
4. Tanggap Darurat
5. Pemulihan
6. Evaluasi

**LAPORAN PROTOTYPE
YANG DIKIRIMKAN KE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**MASYARAKAT PESISIR TANGGUH BENCANA
Capacity Building Organisasi Kemasyarakatan PWI - LS Kecamatan Cikedung, Kabupaten
Indramayu Terhadap Krisis Ekosistem Pesisir Pantai
1006-KLPPM/4208/UNTAR/V/2026**



Tim Pelaksana Abdimas:

Nama Ketua NIDN/NIDK: Prof . Dr. H. Rasji, S.H., M.H (0409056702)

Nama Mahasiswa NIM : Sherly (205250051)
Nama Mahasiswa NIM : Keysha Nafa Aulia S (205250216)
Nama Mahasiswa NIM : M.A. Jabbar Rivaldi (205250273)
Nama Mahasiswa NIM : Dion Raja Budiman (205250272)
Nama Mahasiswa NIM : Muhamad Feri Al'Buni (205240264)

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
TAHUN
2026**

A. RINGKASAN

Wilayah pesisir Indramayu menghadapi berbagai ancaman seperti abrasi pantai, kerusakan mangrove, banjir rob, kekeringan, pencemaran lingkungan, dan dampak perubahan iklim. Kondisi ini memerlukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan.

B. DESKRIPSI

Wilayah pesisir Indramayu menghadapi berbagai ancaman seperti abrasi pantai, kerusakan mangrove, banjir rob, kekeringan, pencemaran lingkungan, dan dampak perubahan iklim. Kondisi ini memerlukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan.

No	Komponen	Penjelasan
1.	Definisi Bencana	Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat akibat faktor alam, non alam, atau manusia yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi.
2.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan, Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir.
3.	Ancaman Pesisir Indramayu	Abrasi pantai, Banjir rob, Kerusakan hutan mangrove. Kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, Intrusi air laut, Kerusakan tambak dan terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir.
4.	Langkah Mitigasi (6 Tahap)	Identifikasi Risiko, Pencegahan dan Pengurangan Risiko, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, Pemulihan, dan Evaluasi dan Penguatan Kapasitas.
5.	Peran PWI-LS	Sebagai penggerak masyarakat, Sebagai fasilitator edukasi, Sebagai penghubung antar pihak, Sebagai pengawas lingkungan, Sebagai pembentuk relawan siaga bencana.
6.	Program Pengabdian	Sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat → Pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi evakuasi → Pembentukan kelompok relawan bencana → Pembuatan jaringan informasi siaga bencana → dan Kegiatan konservasi lingkungan pesisir.

C. GAMBAR/FOTO PRODUK PENDUKUNG



CAPACITY BUILDING

ORGANISASI KEMASYARAKATAN PWI-LS

Latar Belakang

Pesisir Indramayu rentan abrasi, banjir rob, dan pencemaran. Penguatan kapasitas masyarakat diperlukan untuk mitigasi bencana.

Peran PWI-LS

Edukator, fasilitator, penghubung, dan penggerak relawan bencana.

Pengembangan Kemampuan PWI-LS

- Edukasi Masyarakat
- Manajemen Organisasi
- Komunikasi Bencana
- Kepemimpinan Relawan
- Pemetaan Risiko
- Kerja Sama Mitra

Dibuat oleh:

- Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H
- Sherly
- Keysha Nafa Aulia S
- M.A. Jabbar Rivaldi
- Dion Raja Budiman
- Muhamad Feri Al'Buni

Tujuan Capacity Building PWI-LS

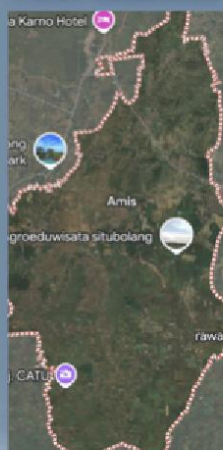
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Memperkuat kapasitas organisasi.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
- Menciptakan anggota yang kompeten, profesional, dan berdaya saing.



Goals

- Meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan PWI-LS
- Agar mampu menjalankan fungsi sosial,
- Sebagai sarana pemberdayaan masyarakat,
- Bentuk kepedulian lingkungan secara lebih profesional, efektif, dan berkelanjutan

PETA CIKEDUNG



Dasar Ancaman Hukum

UU NO. 24 THN 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
 UU NO. 32 THN 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan.
 PP NO. 21 THN 2008 Tentang Penaggulangan Bencana.
 Peraturan Terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir

Langkah Mitigasi

1. Identifikasi Risiko	4. Tanggap Darurat
2. Pencegahan	5. Pemulihan
3. Kesiapsiagaan	6. Evaluasi

D. HKI (001305589)

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EC002026098794, 26 Juni 2026
Pencipta	
Nama	: Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H, Dion Raja Budiman dkk
Alamat	: Perumahan Merpati Blok O No 18 RT 006/010, Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta. 11830
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H, Dion Raja Budiman dkk
Alamat	: Perumahan Merpati Blok O No 18 RT 006/010, Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta. 11830
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Poster
Judul Ciptaan	: Program Capacity Organisasi Kemasyarakatan PWI-LS Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu Terhadap Krisis Ekosistem Pesisir Pantai.
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 22 Juni 2026, di Kota Adm. Jakarta Barat
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	: 001305589
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	a.n. MENTERI HUKUM DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b Direktur Hak Cipta dan Desain Industri  Agung Damarsasongko,SH.,MH. NIP. 196912261994031001
	Disclaimer: 1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan. 2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. 3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H	Perumahan Merpati Blok O No 18 RT 006/010 Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat
2	Dion Raja Budiman	Jl. Sebengkong Waru, Kec Tarakan Tengah, Kelurahan Sebengkong, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tarakan Tengah, Kota Tarakan
3	Keysha Nafa Aulia S	Jl. Ahmad Yani Babussalam, Kab. Aceh Tenggara
4	Sherly	Jl. Merdeka Baruno.02 Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang
5	M.A. Jabbar Rivaldi	JLN ST MOH MANSYUR NO.546 Ilir Barat II, Kota Palembang
6	Muhamad Feri Al'Buni	Jalan Cendrawasih II No 100 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H	Perumahan Merpati Blok O No 18 RT 006/010 Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat
2	Dion Raja Budiman	Jl. Sebengkong Waru, Kecamatan Tarakan Tengah, Kelurahan Sebengkong, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Tarakan Tengah, Kota Tarakan
3	Keysha Nafa Aulia S	Jl. Ahmad Yani Babussalam, Kab. Aceh Tenggara
4	Sherly	Jl. Merdeka Baruno.02 Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang
5	M.A. Jabbar Rivaldi	JLN ST MOH MANSYUR NO. 546 Ilir Barat II, Kota Palembang
6	Muhamad Feri Al'Buni	Jalan Cendrawasih II No 100 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat





Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Jakarta, 12 Juni 2026

Ketua Pelaksana



Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H

NIDN/NIDK: 3175080905670002

Lampiran 6. Laporan Produk/Prototype



**PERJUANGAN WALISONGO INDONESIA
KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN CIKEDUNG**

Sekretariat PWI-LS Indramayu Kec. Cikedung : Jl. Cikedung - Terisi,
Desa Cikedunglor Kecamatan Cikedung Tlep. 081324495781 e-mail :

perjuanganwalisongoindonesia@gmail.com Nomor : AHU-0010149.ah.01.07.tahun 2024



Indramayu, 5 Juni 2026

Nomor : 021/DPC-PWI-LS-CIK/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth.
Pengurus dan Tokoh masyarakat Simpatisan PWI-LS
Di

Tempat

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Berdasarkan surat undangan dari UNTAR Universitas Tarumanegara pada tanggal 29 Mei 2026 terlampir, kami pengurus DPC Perjuangan Wali Songo Indonesia – Laskar Sabilillah Cikedung mengajak dan menghimbau kepada Jajaran Kepengurusan dan simpatisan PWI-LS Cikedung agar guyub dan kompak menyambut Tamu Dari Universitas Tarumanegara berkunjung ke DPC PWI-LS Cikedung yang telah dijadwalkan pada :

Hari : Ahad
Tanggal : 7 Juni 2026
Waktu : 8.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Griya asri kesepuhan PWI-LS Cikedung DR.KH. Ibrohim Nawawi M.Pd (Sekret DPC PWI-LS 2)
Acara : Menyesuaikan agenda UNTAR

Demikian Surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih
Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokantuh

**PIMPINAN CABANG
PERJUANGAN WALISONGO INDONESIA – LASKAR SABILILLAH
CABANG KECAMATAN CIKEDUNG KABUPATEN INDRAMAYU
MASA KHIDMAT 2025 - 2031**

**KETUA CABANG KECAMATAN CIKEDUNG
KABUPATEN INDRAMAYU**

KETUA

ALIN TOPAN



SEKERTARIS

ANWAR MUZAKKIE

Lampiran 7. Surat Persetujuan Mitra

LOGBOOK PKM

Judul PKM : Capacity Building Organisasi
Kemasyarakatan PWI - LS Kecamatan
Cikedung, Kabupaten Indramayu
Terhadap Krisis Ekosistem Pesisir Pantai

Ketua Pelaksana : Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H

Anggota
 1. Sherly (205250051)
 2. Keysha Nafa Aulia S (205250216)
 3. M.A. Jabbar Rivaldi (205250273)
 4. Dion Raja Budiman (205250272)
 5. Muhamad Feri Al'Buni (205240264)

Hari/Tanggal Wajib diisi	Kegiatan	Pelaksana Ketua/Anggota	Catatan (uraian Kerja)
4 Maret 2026	Pembentukan tim	Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H	- Melakukan pembentukan tim pada sesi 1, membahas ide awal untuk pengabdian masyarakat - Membentuk tim skala besar pada sesi 2, serta membagi tugas dan peranan masing masing anggota
7 Maret 2026	Koordinasi awal dengan mitra	M.A. Jabbar Rivaldi	- Melakukan komunikasi awal dengan IRMA, menjelaskan tujuan pengabdian masyarakat dan membangun relasi kerjasama.
27 April 2026	Pengajuan proposal	Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H	- Mengajukan proposal Pengabdian Masyarakat mengenai Hukum Kebencanaan kepada LPPM.
30 April 2026	Persetujuan proposal	Prof. Dr. H. Raji, S.H., M.H	- Persetujuan proposal oleh LPPM .
6 Maret 2026	Studi pustaka	Ketua pelaksana: Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H Anggota: 1. Sherly 2. Keysha Nafa Aulia S 3. M.A. Jabbar Rivaldi 3. Dion Raja Budiman 4. Muhamad Feri Al'Buni	- Mencari dan mempelajari referensi terkait hukum kebencanaan, pemulihan lingkungan, dan ekosistem pesisir. - Membentuk draft proposal. - Mengolah data selama 5 tahun terakhir.

30 Mei 2026	Koordinasi lanjutan dengan mitra	Dion Raja Budiman & Muhamad Feri Al'Buni	- Koordinasi lanjutan mengenai pelaksanaan acara, lokasi, audiens, dll.
2 Juni 2026	Rapat persiapan dan pembagian tugas	Sherly	- Pembagian tugas dan pendataan barang yang dibutuhkan.
2 Juni 2026	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Keysha Nafa Aulia S	-Persiapan alat dan materi yang dibutuhkan
5 Juni 2026	Keberangkatan dan persiapan acara	Ketua pelaksana: Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H Anggota: 1. Sherly 2. Keysha Nafa Aulia S 3. M.A. Jabbar Rivaldi 4. Dion Raja Budiman 5. Muhamad Feri Al'Buni	- Prof. Dr. H. Rasji, S.H, M.H.selaku ketua pelaksana melaksanakan briefing keberangkatan, menyusun rundown dan materi presentasi sosialisasi hukum kebencanaan - M.A. Jabbar Rivaldi dan Muhammad Haikal Rifurio melakukan koordinasi dengan pemilik tempat berlangsungnya acara dan masyarakat setempat, yakni Pak Manto dan Pak Ali Topan, koordinasi ulang terkait kesiapan lokasi kegiatan, perlengkapan acara, jumlah peserta, konfirmasi jumlah peserta PWI-LS, - Shery dan Keysha Nafa Aulia S koordinasi penginapan dan konsumsi peserta. - Dion Raja Budiman dan Muhamad Feri Al'Buni melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana selama acara berlangsung, melakukan persiapan perlengkapan dan kebutuhan kegiatan.

6 Juni 2026	Persiapan Acara	Ketua pelaksana: Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H Anggota: 1. Sherly 2. Keysha Nafa Aulia S 3. M.A. Jabbar Rivaldi 4. Dion Raja Budiman 5. Muhamad Feri Al'Buni	- Survei konsumsi untuk <i>snack box</i>. - Konfirmasi jumlah kehadiran, titik penjemputan dan lokasi acara. - Koordinasi ruang untuk kegiatan, titik lokasi, titik parkir kendaraan, dan ketersediaan alat. - Evaluasi & revisi susunan <i>rundown</i> acara. - Simulasi <i>Games</i>. - Gladi Resik MC. - Pembagian PIC koordinator & pelaksana divisi transportasi, acara, dan konsumsi.
7 Juni 2026	Pelaksanaan acara	Ketua pelaksana: Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H Anggota: 1. Sherly 2. Keysha Nafa Aulia S 3. M.A. Jabbar Rivaldi 4. Dion Raja Budiman 5. Muhamad Feri Al'Buni	- Persiapan <i>snack box</i>. - Checkout penginapan. - Persiapan ruang seminar, area pendaftaran peserta, dan konsumsi. - Penjemputan peserta PWI-LS. - Melaksanakan acara sesuai <i>rundown</i>. - Menata ruang pasca acara. - Mengantar kembali pihak PPWI-LS ke titik awal penjemputan. - Perjalanan arah pulang.
Juni 2026	Evaluasi pelaksanaan kegiatan	Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H	-Pembahasan rangkain abdimas lapangan -Hambatan hambatan dan solusi lapangan

13 Juni 2026	Monitoring dan Evaluasi	Ketua pelaksana: Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H Anggota: 1. Sherly 2. Keysha Nafa Aulia S. 3. M.A. Jabbar Rivaldi 4. Dion Raja Budiman 5. Muhamad Feri Al'Buni	- Pembuatan prototype - Penyelesaian draft artikel - Pembuatan Logbook - Pendaftaran HKI - Pembuatan laporan prototype - Penyusunan laporan kemajuan - Penginputan monitoring evaluasi
--------------	-------------------------	---	--

Lampiran 8. Logbook